



## S A M B U T A N

KETUA DPRD KALIMANTAN TIMUR

### **PADA ACARA**

### **PENYAMPAIAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD**

=====

Hari/Tgl : Kamis, 22 April 2021

Waktu : 08.00 Wita s/d selesai

Tempat : Ruang Masing-Masing melalui ViCon Via Aplikasi  
Zoom

Agenda : Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi  
Kalimantan Timur Pada Musrenbang Tahun 2021

=====

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan.

Selamat Pagi, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.

- ✓ Yang terhormat, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili.....;
- ✓ Yang terhormat, Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur;

- ✓ Yang saya Hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kalimantan Timur ;
- ✓ Yang Kami Hormati Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
- ✓ Yang Kami Hormati Bupati dan Walikota Se-Kalimantan Timur;
- ✓ Yang Kami Hormati Sekretaris Daerah, Para Asisten dan Kepala OPD di jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- ✓ Yang Kami Hormati Sekretaris Daerah, Para Asisten dan Kepala OPD di jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur.
- ✓ Yang Kami Hormati Bapak/Ibu Peserta dan Undangan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 yang berbahagia .

Puji Syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan rahmat-Nya, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021, yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Guna penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (R-PJMD) tahun 2019-2023 dan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

Sebelum sampai pada agenda pokok, izinkan saya atas nama DPRD Kaltim mengucapkan ***Marhaban Ya Ramadhan***. Selamat Menjalankan Ibadah Puasa 1442 H. Semoga di Bulan Ramadhan ini, kita selalu senantiasa diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran hingga kita selalu menjadi muslim yang baik dan berusaha untuk terus selamanya menjadi lebih baik. Dan Semoga kita selalu menjadi insan – insan Istiqomah yang kembali Fitrah. Aamiin..

**Hadirin yang kami hormati,**

Kegiatan Musrenbang ini memiliki peran dan point strategis dalam penyampaian dokumen Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang merupakan daftar permasalahan berupa saran dan pendapat yang didasarkan pada hasil penyerapan aspirasi melalui reses, Dengar Pendapat dengan Mitra Kerja OPD, dan Kunjungan Kerja Dewan serta telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan.

**Bapak Menteri dan Saudara Gubernur yang kami hormati,**

DPRD Kaltim mengucapkan terima kasih dan menyambut baik diselenggarakannya agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021, Guna penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019-2023 dan Penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari R-PJMD untuk jangka waktu satu tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Secara eksplisit ditegaskan tentang unsur penyelenggara pemerintahan daerah meliputi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perlu diketahui bahwa Undang-Undang mengamanatkan DPRD bersama Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang sesuai fungsinya masing-masing dan dalam penyelenggaraannya dibantu oleh Perangkat Daerah.

**Hadirin yang kami hormati,**

Pedoman Penyusunan Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pokok-Pokok Pikiran DPRD pada Pasal 153, disebutkan Kaidah perumusan kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) huruf k dicantumkan dengan kalimat, “Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD”

Pada pasal 178 ayat 1,2,3 dan 4. Disebutkan ayat 1) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf k merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Ayat 2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Ayat 3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah. Dan Ayat 4) Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan.

Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan amanat peraturan perundang-undangan dalam perencanaan

pembangunan daerah, khususnya penyusunan rancangan awal RKPD untuk penyempurnaan rancangan RKPD menjadi dokumen perencanaan kerja Pemerintah Daerah, dalam satu tahun yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan rancangan KUA-PPAS APBD Kalimantan Timur.

Dengan mengacu kepada UU No. 25 Tahun 2004, pasal 5 ayat 3 menyebutkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kemudian dalam pasal 20 ayat 2 menyebutkan bahwa Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD. UU No. 25 Tahun 2004, pasal 25 ayat 2 menyebutkan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan R-APBD.

Selanjutnya dalam pasal 22 ayat 2 menyebutkan bahwa Rancangan RKPD menjadi bahan bagi Musrenbang. Pasal 22 ayat 2 menyebutkan bahwa Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, unsur-unsur Penyelenggara Pemerintahan adalah Pemerintah Daerah dan DPRD.

Diharapkan dengan dasar hukum tersebut diatas, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan

Timur tahun 2021. Provinsi Kaltim dapat memformulasi RKPD Kaltim 2022 yang akan meminimalisir terjadinya Perbedaan Pendangan antara tuntutan, harapan, kepentingan rakyat dengan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah.

Disamping itu pula, akan mampu meminimalisir terjadinya ketidakpastian dan ketidakpuasan aspirasi yang tidak terpenuhi serta meminimalisir terjadinya in-efisiensi anggaran. Serta rangkaian kegiatan ini berfungsi sebagai konsultasi publik untuk menyelaraskan rancangan RKPD dengan usulan dari masyarakat melalui setiap tahapan Musrenbang, dimana didalamnya terjadi proses negosiasi, rekonsiliasi dan harmonisasi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan non pemerintah sekaligus untuk mencapai konsensus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2022.

**Bapak / Ibu Serta Hadirin yang berbahagia,**

Sebelum saya menyampaikan Pandangan-pandangan yang berasal dari Fraksi dan Komisi terlebih dahulu Saya akan menyampaikan hasil Reses terkait permasalahan pembangunan yang dihadapi saat ini, yakni :

1. Secara umum dalam Pokok-Pokok Pikiran dari masing-masing unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, tersirat harapan masyarakat untuk mendapatkan perbaikan terhadap pelayanan

Infrastuktur jalan dan Jembatan di wilayah Utara, Tengah dan Selatan Kalimantan Timur.

2. Realitas lapangan saat ini menunjukkan, bahwa kita bisa melihat dan rasakan ruas Jalan Tanah Datar, salah satu desa di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang notabene jalan Nasional atau jalan Negara. yang masih kita rasakan susahny melintasi jalan tersebut, apalagi ketika turun hujan, maka kendaraan dari dan menuju kota samarinda akan terhenti selama berjam-jam, berapa kerugian material yang dirasakan masyarakat terhadap rusaknya jalan tersebut.

Tugas kita sebagai Pengambil kebijakan adalah melakukan koordinasi, mengkomunikasikan dan mensinergikan upaya strategis dalam memaksimalkan Standar pelayanan Minimal fungsi jalan tersebut.

3. Tunjangan atau Insentif dari Pemerintah Pusat khusus bagi tenaga kesehatan belum ditransfer ke daerah. Sementara mereka secara professional bekerja siang dan malam untuk melayani masyarakat Kalimantan timur. Untuk itu harus ada upaya dari kita untuk mendapatkan hak mereka.

Dalam kesempatan ini, DPRD Kaltim menyampaikan pandangan-pandangan yang berasal dari seluruh Fraksi di DPRD Provinsi Kalimantan Timur, secara sektoral lebih rinci dapat dilihat pada bagian lampiran.



Adapun Pokok-Pokok Pikiran Dari Masing-Masing Unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur melalui Fraksi-Fraksi DPRD Kaltim tahun 2022 sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Golongan Karya berjumlah 792 Kegiatan
2. Fraksi PDI-P berjumlah 1.483 Kegiatan
3. Fraksi Partai Gerindra berjumlah 358 Kegiatan
4. Fraksi PAN berjumlah 780 Kegiatan
5. Fraksi PKB berjumlah 1.183 Kegiatan
6. Fraksi PPP berjumlah 338 Kegiatan
7. Fraksi PKS berjumlah 193 Kegiatan dan ;
8. Fraksi Demokrat - Nasdem berjumlah 575 Kegiatan

**Dengan Total keseluruhan Berjumlah 5.652 Kegiatan**

Perlu kami sampaikan, bahwa usulan- usulan Kegiatan diatas perlu menjadi prioritas untuk dianggarkan baik melalui APBD tahun anggaran 2022 baik murni maupun perubahan.

Kami sampaikan usulan-usulan Kegiatan hasil Reses 55 anggota DPRD Provinsi Kaltim, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kata Sambutan ini.

**Bapak Menteri dan Saudara Gubernur yang saya hormati,**

Demikian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kalimantan Timur disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019-2023 dan Penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

Untuk itu diperlukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara pelaku pembangunan baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat di daerah sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan, terpadu dan terarah dalam jangka panjang.

*Terima kasih atas perhatiannya,*

Wabillahi Taufik Walhidayah,

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur*

*Drs. H. Makmur HAPK MM*